

DAMPAK PRIVATISASI PADA KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA

oleh

Vita Aprilina

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi

Abstract

This study aims to examine the differences in financial performance before and after the privatization of state enterprises. The population in this study is all state-owned companies in Indonesia, while the sample in this study for phase I testing of the years 1993-2010, phase II testing of the years 2007-2011, namely, doing an IPO and listing on the Indonesia Stock Exchange selected by purposive sampling method. This study used t-test. The results showed there is no difference performance in the company's financial before and after the privatization of state enterprises.

Keywords: *privatization, corporate governance, financial performance, state-owned enterprises (SOEs).*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja tersebut harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus maka akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja (Lingle dan Schiemann, 1996).

Metode penilaian kinerja yang digunakan selama ini, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembandingan yang potensial, baik berupa laporan keuangan di masa lalu atau dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen dan Mowen, 1997).

Pengukuran kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam indikator (Lingle dan Schiemann, 1996). Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan *return on equity* (ROE) sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas. ROE adalah rasio laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri untuk mengukur tingkat hasil investasi pemegang saham. Nilai ROE yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat hasil yang lebih baik kepada pemegang saham atas investasinya. Selain itu, nilai ROE yang tinggi menunjukkan penerimaan badan usaha atas investasi yang sangat baik dan manajemen biaya yang efektif (Sabardi, 1995: 116). Pengukuran profitabilitas juga dapat digunakan dengan indikator *return on assets* (ROA) karena ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur tingkat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan harta yang dimiliki (Haniffa dan Cooke, 2005).

Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa pelaku utama dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sektor pemerintah, koperasi, masyarakat atau individu, dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi sektor swasta luar negeri dan sektor swasta dalam negeri. Sektor

swasta dalam negeri meliputi dari perusahaan swasta murni dan perusahaan badan usaha milik pemerintah yang meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BUMN. Pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tersurat bahwa landasan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi. Artinya adalah bahwa produksi dikerjakan dari semua, oleh semua, dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, karena kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Dari kerangka pasal ini, tersirat bahwa *point of interest* perekonomian Indonesia adalah kesejahteraan rakyat, sehingga pengelolaan pasal 2 ayat 1 butir d, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN merupakan salah satu pelaku utama perekonomian rasional yang bertujuan untuk mendukung keuangan Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong pengelolaan badan usaha milik pemerintah terutama BUMN. Melalui kepemilikan mayoritas di dalam BUMN pemerintah juga merupakan pelaku utama di dalam ekonomi Indonesia.

BUMN selama ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. BUMN dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien, karena boros dalam pemanfaatan sumber daya, sarat dengan korupsi, serta memiliki profitabilitas yang rendah. Kritik ini cukup beralasan apabila dilihat dari perkembangan kinerja banyak BUMN dari waktu ke waktu yang memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat pula BUMN yang memiliki kinerja yang sangat baik. Argumen yang sering digunakan sebagai penjelasan atas belum optimalnya kinerja BUMN adalah tujuan pendiriannya yang lebih diprioritaskan pada pemberian pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan perolehan laba.

Kinerja BUMN yang relatif rendah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena akan semakin tertinggal dan sulit bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. Terlebih lagi bila keberadaan BUMN ditempatkan dalam tata perekonomian dunia dewasa ini yang semakin mengglobal dan seakan-akan tanpa batas, di mana BUMN tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan transnasional dari berbagai negara maju. Kinerja BUMN yang rendah secara langsung atau pun tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, mengingat salah satu perannya adalah sebagai penyedia *public goods*, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Di samping itu peran BUMN juga menyediakan *input* seperti listrik, gas bumi, air, minyak dan lainnya untuk kepentingan dunia usaha. BUMN memang telah mampu memainkan peran untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat, tetapi peran tersebut dicapai dengan biaya yang sangat tinggi atau tidak efisien (Kantor Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN, 1998). Inefisiensi pengelolaan BUMN jika dibiarkan berlangsung maka akan menjadi beban bagi masyarakat, karena harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN.

Privatisasi menurut sebagian peneliti jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, misalnya Porter (1980), masih menjadi dilema untuk dijalankan pemerintah. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Dia menyatakan bahwa privatisasi akan menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Dorongan terhadap pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama *stakeholder* dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan *stakeholder* untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

Brich dan Harr (2000) melakukan penelitian pengaruh privatisasi di dua dekade terakhir di Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela dan negara Caribbean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh positif pada produktivitas dan berpengaruh negatif pada tenaga kerja. Pengaruh privatisasi terhadap tenaga kerja bersifat negatif karena langkah yang sering ditempuh dalam privatisasi adalah pengurangan pegawai.

Untuk mengatasi masalah kinerja BUMN salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN. Privatisasi adalah kebijakan yang paling populer dibandingkan dua alternatif kebijakan lain yang dipromosikan pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN, yaitu restrukturisasi dan profitisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (UU

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Kebijakan tersebut sampai saat ini masih sering menjadi kontradiksi, di mana terdapat pihak-pihak yang bersifat pro maupun kontra. Pihak yang pro memandang privatisasi sebagai suatu solusi bagi pemerintah untuk mengatasi defisit APBN dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja BUMN secara bertahap. Sedangkan pihak yang kontra memandang privatisasi sebagai upaya untuk menggadaikan nasionalisme, khususnya untuk privatisasi BUMN yang sebagian sahamnya dijual kepada pihak asing dalam proporsi yang cukup signifikan.

Kontradiksi atau polemik yang timbul seputar privatisasi pada dasarnya dilandasi oleh pengamatan empirik atas pengalaman pelaksanaan privatisasi yang perlu dilakukan secara cermat, baik dari segi metode maupun waktunya, agar dapat dihasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung. Savas (2000) misalnya mengemukakan bahwa privatisasi dapat mendorong keunggulan daya saing, tetapi transformasi dari perusahaan negara melalui privatisasi belum sepenuhnya dapat menjamin tercapainya kondisi tersebut.

Saat *Initial Public Offering* (IPO) di pasar modal, yang merupakan saat yang penting bagi perusahaan BUMN di mana penilaian investor terhadap kondisi dan prospek perusahaan akan menentukan besarnya dana yang dapat diakumulasi oleh perusahaan dari pasar modal (Lilis Setiawati, 2002). Informasi yang pasti tersedia bagi investor untuk menilai perusahaan pada saat melakukan IPO adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan diharapkan mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang riil.

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan privatisasi, namun menurut Taylor dan Warrack (1998) dapat diklasifikasikan menjadi empat faktor. Faktor pertama masalah ideologi yang pada intinya menitikberatkan bahwa semua aktivitas ekonomi harusnya diserahkan kepada sektor swasta. Ideologi dapat menjadi pendorong yang kuat untuk dilaksanakannya privatisasi. Faktor kedua adalah akuntabilitas yang dilandasi oleh gagasan bahwa sektor swasta lebih memiliki rasa tanggung jawab kepada publik, sebagai konsekuensi dari lebih diperhatikannya aspek kepercayaan dan kredibilitas, karena pola hubungan bisnis yang spesifik. Faktor ketiga adalah masalah efisiensi, di mana pada banyak kasus sektor publik lebih lambat dalam membuat keputusan dan sering kali menciptakan ketidakpastian. Kondisi ini berbeda dengan sektor swasta yang pembuatan keputusannya relatif harus lebih cepat, lebih besar, meskipun dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Faktor keempat adalah pembiayaan, yaitu privatisasi dimaksudkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana segar untuk memperbaiki fasilitas guna meningkatkan kinerja keuangan.

1.2 Perumusan Masalah

Setiyanto (2007) menguji implikasi kebijakan privatisasi terhadap kinerja PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) diukur dengan menggunakan data keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kinerja PT TELKOM pasca privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT TELKOM pasca privatisasi mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja PT TELKOM pasca privatisasi. Heriyadi (2005) menguji pengaruh privatisasi terhadap kinerja bank BNI. Kinerja diukur dengan *capital, asset quality, manajemen, earnings and likuidity* (CAMEL). Teknik analisis yang digunakan adalah *time series technique trend ratio*. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata ratio CAMEL mengalami peningkatan setelah adanya privatisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah privatisasi, kinerja BUMN mengalami peningkatan.

Brich dan Harr (2000) melakukan penelitian pengaruh privatisasi di dua dekade terakhir di Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela dan negara Caribbean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh positif pada produktivitas dan berpengaruh negatif pada tenaga kerja. Porter (1980), masih menjadi dilema untuk dijalankan pemerintah. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Dia menyatakan bahwa privatisasi akan menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Dorongan terhadap pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama stakeholder dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan stakeholder untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

Sesuai dengan *research gap*, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan BUMN tiga tahun sebelum privatisasi dan tiga tahun sesudah privatisasi?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Privatisasi dan Kinerja Keuangan

Alasan untuk melakukan privatisasi perusahaan publik didasarkan pada teori *The Property Right Approach*. Pendekatan ini mengeksplorasi perbedaan antara perusahaan publik dan swasta. Struktur ekonomi yang didominasi negara berbeda dengan struktur ekonomi yang didominasi swasta dalam kaitannya dengan fungsi maksimisasi. Pada struktur ekonomi dominasi negara, organisasi yang dimiliki negara dipengaruhi dan dikontrol oleh kelompok-kelompok politisi, menteri, dan manajer publik. Masing-masing *economic agent* memandang kepentingan publik sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Selain itu, dalam organisasi yang dimiliki negara, *nontransferability right* pada keuntungan yang akan datang (*future benefit*) dan tidak adanya *residual claims* pada *income* perusahaan negara memperlemah hubungan antara usaha individual dengan *reward*.

Pada struktur ekonomi yang didominasi swasta, pemilik (*shareholders*) perusahaan swasta akan memaksimalkan nilai organisasi dengan memastikan bahwa manajer akan mengalokasikan sumber daya pada utilitas maksimal. Kemampuan dan kemauan pemilik untuk mentransfer hak kepemilikan (*ownership rights*) akan menyebabkan realokasi sumberdaya dari utilitas rendah ke utilitas tinggi. Penulis *Property Right Theory*, seperti Jensen dan Meckling (1976) dan Boycko *et al.* (1996) menunjukkan bahwa semakin meluasnya struktur kepemilikan dalam ekonomi akan menyebabkan semakin tingginya kemungkinan sumberdaya yang dialokasikan, hal ini sangat tergantung pada seberapa jauh ekonomi menerapkan *market-based system*.

Perusahaan swasta adalah perusahaan yang dimiliki oleh individual yang bebas, dalam keterbatasan peraturan, untuk memiliki, menggunakan, dan menukar pada hak kepemilikan swasta terhadap aset. Hak tersebut memberikan pemilik *individual residual claims* pada aset dari perusahaan swasta. Ketika aset tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di mana konsumen meminta pada biaya yang lebih rendah dibanding harga pasar, maka terjadi peningkatan *income* dan kesejahteraan pemilik. Sebaliknya jika biaya produksi melebihi harga pasar, kerugian terjadi dan nilai perusahaan dan kesejahteraan serta *income* pemilik aset perusahaan menurun. Pemilik perusahaan swasta memperoleh keuntungan dari manajemen yang efisien dan menanggung kerugian ketika manajemen tidak efisien. Pemilik perusahaan swasta dihadapkan pada *bottom line* yang mengukur klaim pemilik.

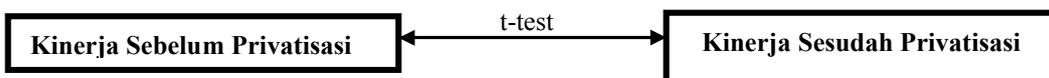
Insentif tercipta oleh *private property right* dengan menghubungkan antara hasil yang didapat dari penggunaan aset dan kesejahteraan dan *income* pemilik. Pemilik perusahaan swasta mempunyai insentif untuk memonitor manajer dan pekerja di perusahaan, sehingga permintaan konsumen dipenuhi dengan cara yang *cost effective* sepanjang waktu. Adanya monitoring yang baik, manajer swasta tidak ada dorongan untuk melakukan tindakan yang melalaikan kewajibannya dan melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan usaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik. *Private property rights* menimbulkan dorongan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Perusahaan swasta dan publik harus mempunyai rencana meskipun perencanaan pada perusahaan publik berbeda dengan perusahaan swasta. *Public plan* dikembangkan oleh manajer dan pekerja yang tidak menanggung biaya kesalahan dan *future benefit* yang dihasilkan perusahaan. *Public plans* dikembangkan oleh orang yang tidak harus menjawab pertanyaan pemilik. Perencanaan publik dinilai memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan swasta berbeda di mana *private plan* berusaha mengantisipasi permintaan konsumen dan biaya produksi secara tepat karena *present value* dari perusahaan swasta tergantung pada ketepatan mengantisipasi permintaan dan biaya. Perencanaan perusahaan swasta harus menjawab pertanyaan pemilik yang mengawasi nilai perusahaan yang dimiliki. Perusahaan swasta yang didasarkan pada *private property rights*, cenderung lebih efisien dibanding perusahaan publik. Beberapa penelitian empiris mendukung pendapat ini misalnya *bureaucratic rule of two* menyatakan bahwa biaya perusahaan publik untuk memproduksi kualitas dan kuantitas barang dan jasa mencapai dua kali dibanding perusahaan swasta.

Teori privatisasi lainnya yaitu *Public Choice Approach* yaitu teori privatisasi yang memberikan analisis yang lebih luas dibandingkan *The Property Right Approach*. *Public choice approach* mengasumsikan bahwa politisi, birokrat, dan manajer perusahaan publik lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Pendekatan ini mengasumsikan politisi mementingkan kepentingannya sendiri untuk mencapai tujuan ideologis atau personal dengan batasan tidak kehilangan posisi pada pemilu berikutnya. Bagi politisi, tetap berada dalam kekuasaan adalah tujuan yang utama, sehingga politisi akan menggunakan publik utilities untuk tujuan pribadinya. Hal ini terlihat tidak adanya dorongan bagi politisi untuk melakukan kontrol yang efektif untuk penggunaan sumberdaya Negara dan efisiensi perusahaan publik. *Public utilities* memberikan kesempatan bagi politisi untuk mencapai kepentingan pribadinya yaitu terpilihnya kembali pada pemilu selanjutnya dengan cara penambahan tenaga kerja dan stabilisasi purchasing power. Jika *misuse* dari *public utilities* menyebabkan meningkatnya angka tenaga kerja dan income dalam kurun waktu tertentu, maka sangat mudah bagi pemerintah untuk dapat dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya. Biaya-biaya dari kebijakan yang *misuse* tersebut akan tampak beberapa tahun setelahnya yaitu adanya defisit pada keuangan perusahaan publik yang kemudian memerlukan campur tangan pemerintah dengan subsidi yang pada akhirnya akan meningkatkan defisit anggaran negara.

Privatisasi mempunyai pengertian yang luas. Definisi privatisasi menurut pasal 1 butir 12 UU 19 No. 2003 tentang BUMN yang dimaksud dengan privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa privatisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan atau setelah privatisasi kinerja keuangan meningkat. Setiyanto (2007) menguji implikasi kebijakan privatisasi terhadap kinerja PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) diukur dengan menggunakan data keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kinerja PT TELKOM pasca privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT TELKOM pasca privatisasi mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja PT TELKOM pasca privatisasi. Heriyadi (2005) menguji pengaruh privatisasi terhadap kinerja bank BNI. Kinerja diukur dengan *capital, asset quality, manajemen, earnings and likuidity* (CAMEL). Teknik analisis yang digunakan adalah *time series technique trend ratio*. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata ratio CAMEL mengalami peningkatan setelah adanya privatisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah privatisasi, kinerja BUMN mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1: Kinerja keuangan BUMN meningkat sesudah dilakukan privatisasi.

Berdasarkan pada telaah pustaka awal dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:



Gambar 1
Skema Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti dan paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sekaran, 2006: 267). Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan BUMN di Indonesia.

3.2 Sampel

Sampel adalah bagian penting atau anggota populasi (Sekaran, 2006: 267). Sampel pengujian yang menguji perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi menggunakan data perusahaan yang melakukan privatisasi dari tahun 1996-2007. Pengujian ini dilakukan dari tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah privatisasi. Dengan demikian data yang digunakan untuk pengujian ini berasal dari periode tahun 1993-2010.

3.3 Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel penelitian ini diambil sampel sebanyak 100% dari jumlah populasi (BUMN) yang telah diprivatisasi yang listing di BEI dari tahun 2007-2011. Tahap kedua diambil seluruh BUMN yang sudah privatisasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. BUMN tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),
2. Privatisasi dilakukan pada BUMN, bukan pada anak perusahaan BUMN,
3. BUMN tersebut telah melakukan privatisasi sejak atau sebelum tahun 2007, dan
4. Memiliki data laporan keuangan lengkap selama tahun yang telah ditentukan.

3.4 Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk jenis data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id, www.google.com, Direktori Pasar Modal Indonesia (*Indonesian Capital Market Directory*), dan dari situs masing-masing perusahaan sampel.

3.5 Variabel dan Pengukuran

3.5.1 Privatisasi

Privatisasi pada penelitian ini diukur dengan menghitung dan membandingkan kinerja yang dihitung dengan *return on equity* dan *return on assets* sebelum dan sesudah masing-masing perusahaan perusahaan BUMN itu menerapkan privatisasi.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Variabel dependen identik dengan variabel terikat (Sekaran, 2006: 116). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja Keuangan BUMN. Variabel kinerja keuangan diukur menggunakan:

1. *Return On Equity (ROE)*

ROE disebut juga dengan Rentabilitas modal sendiri yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal sendiri.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. *Return On Assets (ROA)*

Indikator profitabilitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif statistik

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi variabel yang diteliti yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *maksimum*, dan *minimum*. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan keputusan data (Santoso, 2012:54).

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran data yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai total (*sum*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data penelitian ini. Deskriptif statistik semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
ROE	70	.01	.59	15.00	.2143	.13133
ROA	70	.00	.43	6.94	.0991	.10040
BSIZE	70	3.00	8.00	394.00	5.6286	.95054
PROKOM	70	.00	1.00	30.58	.4369	.17087
JRDK	70	6.00	51.00	1435.00	20.5000	9.91960
LBPDK	70	.00	1.00	36.00	.5143	.50340
JKA	70	3.00	8.00	316.00	4.5143	1.22466
PROKAI	70	.00	1.00	28.95	.4136	.40060
PROLBPKA	70	.00	1.00	49.85	.7121	.28756
JRKA	70	5.00	51.00	1679.00	23.9857	8.62503
<i>Valid N (listwise)</i>	70					

4.2 Uji beda mean

Pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji beda dua mean. Uji beda dua mean untuk sampel berpasangan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah dilaksanakannya privatisasi. Adapun rumusan uji beda meannya adalah sebagai berikut rumusan nilai t hitung:

$$D_n = X_{1n} - X_{2n}$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n}$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n-1}}$$

$$\text{Maka: } t = \dots \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

Keterangan:

D = Selisih dari observasi berpasangan,

X_{1n} = Sampel pertama pada observasi ke i,

X_{2n} = Sampel kedua pada observasi ke i,

i = 1,2,3 n,

\bar{D} = mean dari harga D_i /harga setiap pasang nilai,

S_D = deviasi standar dari harga-harga D_i , dan

n = banyaknya pasangan nilai.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ROESBLM	ROESSDH	ROASBLM	ROASSDH
N		33	33	33	33
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.2155	.5382	.0700	.0230
	<i>Std. Deviation</i>	.11350	2.23330	.06548	.17282
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.135	.475	.197	.349
	<i>Positive</i>	.135	.475	.197	.184
	<i>Negative</i>	-.078	-.349	-.143	-.349
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.777	2.727	1.132	2.003
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.582	.000	.154	.001

Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa ROE dan ROA sesudah privatisasi ternyata hasilnya tidak normal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ROESSD $0,000 < 0,005$, dan nilai ROASSDH $0,001 < 0,005$, berarti dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena hasil tidak berdistribusi normal maka akan diuji menggunakan statistik non-parametrik dengan uji *Wilcoxon*.

Tabel 3
Wilcoxon Signed Ranks Test for ROE

		<i>Ranks</i>		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROESSDH - ROESBLM	<i>Negative Ranks</i>	21 ^a	16.71	351.00
	<i>Positive Ranks</i>	11 ^b	16.09	177.00
	<i>Ties</i>	1 ^c		
	<i>Total</i>	33		

Test Statistics^b

		ROESSDH - ROESBLM
Z		-1.628 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sebesar 0,104. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ROESSDH $0,104 > 0,05$, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan (yang diukur menggunakan *return on equity*) sebelum privatisasi dengan kinerja keuangan sesudah privatisasi.

Pada variabel dependen ROA hasil uji beda mean yang dihitung menggunakan statistik *non-parametrik* yaitu uji *Wilcoxon* dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4
Wilcoxon Signed Ranks Test for ROA

		<i>Ranks</i>		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROASSDH - ROASBLM	<i>Negative Ranks</i>	14 ^a	16.82	235.50
	<i>Positive Ranks</i>	14 ^b	12.18	170.50
	<i>Ties</i>	5 ^c		
	<i>Total</i>	33		

Test Statistics ^b	
	ROASSDH - ROASBLM
Z	-.741 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.459

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sebesar 0,459. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ROASSDH 0,459 > 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan (yang diukur menggunakan *return on assets*) sebelum privatisasi dengan kinerja keuangan sesudah privatisasi.

4.3 Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan Privatisasi

Hasil uji beda mean kinerja perusahaan yang melakukan privatisasi menunjukkan bahwa setelah melakukan privatisasi kinerja keuangan perusahaan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, hal ini berarti dengan privatisasi tidak mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dari modal yang dimilikinya dan tidak mampu meningkatkan keuntungan dari aset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Porter (1980), yang menyatakan bahwa privatisasi masih menjadi dilema untuk dijalankan pemerintah. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Brich dan Harr (2000) yang menunjukkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh negatif pada tenaga kerja. Pengaruh privatisasi terhadap tenaga kerja bersifat negatif karena langkah yang sering ditempuh dalam privatisasi adalah pengurangan pegawai. Pendukung privatisasi berpendapat bahwa untuk meningkatkan efisiensi perusahaan maka perlu adanya pemangkasan jumlah pekerja. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa privatisasi menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Dorongan terhadap pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama *stakeholder* dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan *stakeholder* untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu hasil uji beda mean menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan BUMN tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah privatisasi. Jadi dengan diterapkannya privatisasi maka tidak mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dari modal yang dimiliki dan tidak mampu meningkatkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan di atas, sehingga saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Pengukuran kinerja dapat menggunakan pengukuran yang lainnya yang mungkin hasil akan berbeda pula.
2. Sampel perusahaan tidak terbatas hanya BUMN di Indonesia, tetapi dapat dibandingkan dengan sampel BUMN di Negara lain yang melakukan privatisasi.
3. Jumlah variabel yang diteliti sebaiknya dievaluasi, karena masih banyak variabel independen yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini terbatas pada 14 perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi dan *listing* di BEI. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian.
2. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan yaitu perusahaan BUMN. Hal ini mengakibatkan penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. Benny. 2008. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Anogara, P. 1995. *BUMN, Swasta dan Koperasi: PT Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Arafat, Wilson. 2008. *How to Implement GCG Effectively*. Skyrocketing Publisher. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Barnett, S., 2004. Evidence on the Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization. *IMF Working Paper* No.130, Washington, D.C.:IMF.
- Beesley, M.E. dan S.C. Littlechild. 1997. The Regulation of Privatised Monopolies in the United Kingdom. *Rand Journal of Economics* 20(3): 454-471.
- Boycko, M., Shleifer, A., Vishny, R.W., 1996. A theory of privatisation. *Economic Journal* 106: 309–319.
- Brich, M. dan Jerry Harr. 2000. The Impact of Privatization in the Americas. The making of social movements in Latin America. *International Journal of Urban and Regional Research* 14(4): 648-658.
- D’Souza, Juliet. dan Willian. L. Megginson. 1999. The financial and operating performance of privatized firms during the 1990s. *The Journal of Finance* 54(4): 1397-1438.
- Dalton, D.R.; J.L. Johnson; dan A.E.Ellstrand. 1999. “Number of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis”. *Academy of Management Journal* 42(6): 674-686.
- Deegan, C. dan M. Rankin. 1997. The materiality of environmental information to users of annual reports. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 10: 562-583.
- Fahy, J dan Smithee A. 1996. Strategic marketing and The Resources Based View of The Firm. *Academic Marketing Science Review*. 1999(10).
- Galiani, Sebastian; Paul Gertler; Ernesto Schargrodsky; dan Federico Struzenegger. 2003. “The Costs and Benefits of Privatization in Argentina: A Microeconomic Analysis”. *Latin American Research Network Working Paper* R-454, Washinton DC, United States: Inter American Development Bank, Research Department.
- Hansen, D dan Mowen, M. 1997. Fundamental Cornerstones of Managerial Accounting. www.alibris.co.uk/search/books. 20 November 20011.

- Harper, Joel T. 2002. "Privatisasi Kinerja Perusahaan Pada Negara Republik Ceko. Keuangan dan Real Estate Department". College of Business, Florida Atlantic University
- Helbok, G. dan C. Wagner. 2006. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry. <http://ssrn.com>. 27 Agustus 2011.
- Hossain, Mohammed. 2008. The extent of disclosure in annual reports of banking companies: The case of India. *European Journal of Scientific Research*, 23(4): 659-680.
- Jensen, M. C. 1993. "The Modern Industrial revolution, exit and The Failure of Internal Control System.". *Journal of Finance* 48 Juli: 831-880.
- Jose A. Gomes-Ibanez dan John R. Meyer. 1993. *Going Private: The International Experience With Transport Privatization*.
- Kaplan, R. dan Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*,
- Lehn, K., S. Patro, dan M. Zhao. 2004. Determinants of the Size and Structure of Corporate Governance Boards: 1935-2000. *University of Pittsburgh Working Paper*.
- Lingle, J. H. dan W. A. Schiemann, 1996. Managing Change: Performance Measurement for Destination. www.financeandprofitabilitybooks.com. 20 November 2011.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Megginson, William L., Robert C. Nash, dan Matthias van Randenbergh. 1994. The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis. *Journal of Finance* 49 (2).
- Pombo, Carlos. dan Ramirez Manuel. 2003. Privatization in Colombia: A Plant Performance Analysis. www.ssrn.com. 02 mei 2012
- Porter, M. E. 1980. *Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. N. Y: Free Press.
- Prawirasantosa, Setyanto. 2007. *Kebijakan Privatisasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk*. Skripsi. Semarang: Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sartono. 1999. *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Savas, E. S. 1987. "Privatization and Public Private Partnership". New York: Chatham House.
- Savas, E. S. 2000. "Privatization and Public Private Partnership". New York: Chatham House.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawati, Lilis, (2002). "Manajemen Laba dan IPO Di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi 2002*
- Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Taylor, D.W. dan Warrack, A.A. 1998. Privatization of State Enterprise: Policy Drivers and Lessons Learned. *International Journal of Public Sector Management*, 11: 524–35.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.